

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga Pendidikan Islam yang pertama di Indonesia dan merupakan pendidikan tradisional yang sejarahnya telah berakar selama berabad-abad. Pesantren mengandung makna keislaman dan keaslian Indonesia. Keislaman berarti pesantren merupakan sebuah lembaga yang mana seluruh aktivitas pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan ajaran Islam. Sedang keaslian berarti bahwa pesantren berperan sebagai filter budaya, sehingga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam segera dihilangkan dalam masyarakat. Peran pesantren pada awal kemerdekaan sangat terasa khususnya dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Berbicara soal pesantren dan politik, maka tak lepas dari Islam dan umatnya, sementara umat Islam pernah ada semacam anjuran dari para tokohnya (meski jumlahnya minoritas) agar tidak mencampurkan agama dengan politik terutama di Indonesia pada tahun 1980-an sehingga ada kesan bahwa umat Islam tak perlu berpolitik apalagi dalam masyarakat pesantren dan karena itulah orang Islam dan para tokohnya menjadi *phobi* berbicara soal politik. Dari sini muncul pertanyaan, benarkah umat Islam berhenti berpolitik terutama dikalangan pesantren? Dan benarkah pesantren selama ini tak kenal politik atau tak pernah berpolitik? Model politik yang bagaimana yang dilakukan pesantren, *high politic* atau *low politic*?

Pesantren ke depan tampaknya berpeluang untuk terus bergulat dengan politik, oleh karena itu perlu model politik santun dengan meminjam istilah Amien Rais (Amien Rais, 2004:10), yaitu berpolitik kualitas tinggi (*high politics*) yang memiliki tiga ciri, yaitu *pertama*, setiap jabatan pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk

membangun kesejahteraan bersama. *Kedua*, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya pertanggungjawaban, tanggungjawab di hadapan Allah. *Ketiga*, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip *ukhuwah*, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia, menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi.

Bila masyarakat pesantren dapat melakukan ciri tersebut di atas di saat berpolitik, maka bagi masyarakat yang sehat mentalnya akan mendukung dan tentunya tidak asing lagi bagi pesantren. Mengingat substansi yang ada dalam ajaran pesantren sudah selayaknya pesantren memunculkan peran politiknya dalam tataran internasional, mengingat bahwa pesantren sarat dengan nilai-nilai moral selama belum terkontaminasi oleh budaya Barat.

Sejak menjelang pemilu legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pesantren menjadi sorotan beberapa kalangan. Pesantren menjadi ajang rebutan partai politik dan kandidat calon presiden dan wakil presiden. Keberadaan pesantren sebagai institusi yang kadang-kadang “dimanfaatkan” pengasuhnya untuk mendukung kepentingan politiknya.

Ditilik ke belakang dan merujuk kepada isyarat al-Qur’an Surat at-Taubah: 122; maka pondok pesantren mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi ad-dien*) dan sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan ini tidak begitu disorot oleh para politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat “suara politiknya”.

Rakyat perlu pendidikan politik secara kontiniu atas dasar nilai-nilai tertentu. Masalah politik adalah masalah yang kompleks, bersegi banyak, berubah-ubah dan karena itu perlu seyogianya memahami segala persoalan dan tantangan sistem politiknya agar dapat

menjawab dan memecahkannya secara tepat. Dari sudut ini, pendidikan politik sebagai suatu jenis pendidikan tidak akan pernah selesai.

Maka masyarakat luas perlu ditingkatkan pengetahuannya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan peranannya, mengetahui apa haknya dan mempunyai tanggungjawab. Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal yang baik/konstruktif dan meninggalkan tiap hal yang buruk berdasarkan konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar kekayaan rohani yang dimilikinya.

Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata ke dalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit saja, walaupun kaum ini sering merupakan elemen/eksponen penggerak yang vital.

Arah pendidikan masyarakat guna meningkatkan daya pikir dan daya tanggapnya dalam masalah politik sangat erat hubungannya dengan kebudayaan dan orientasi politik. Dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, budaya politik kaula perlu diarahkan ke budaya politik partisipan. Pendidikan politik ini dapat diselenggarakan salah satunya melalui lembaga atau asosiasi masyarakat dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Di sinilah dibutuhkan peran serta semua pihak dalam upaya peningkatan pendidikan politik. Selain lembaga formal, seperti sekolah, pesantren pun sebagai lembaga pendidikan diharapkan pula dapat memberikan pendidikan politik terhadap umatnya khususnya para santri. Dalam hal ini peranan kiai dapat dilihat bagaimana kepemimpinannya dapat mewariskan nilai-nilai politik terhadap para santrinya.

Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendidikan politik di pesantren yang akhirnya penulis melakukan penelitian di pesantren khususnya

pesantren Turus. Pesantren Turus dipilih menjadi tempat penelitian karena pesantren ini merupakan pesantren yang telah ada semenjak Indonesia belum merdeka tepatnya pada tahun 1942. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa ketika masa penjajahan Belanda dan pada masa Orde Baru, pondok pesantren dilarang untuk berhubungan dengan politik maka penulis ingin mengetahui apakah pesantren Turus juga termasuk pesantren yang mengisolasi diri dari politik terutama dalam hal pewarisan nilai-nilai politik pada para santrinya ataukah justru berperan aktif dalam perpolitik semenjak berdirinya pondok pesantren ini.

Di awal kepemimpinan almarhum KH. Tubagus Moh. 'Idrus sebagai pendiri pesantren Turus, pesantren ini berada dalam naungan partai PSII namun seiring waktu preferensi politik mereka mengalami perubahan, yaitu dengan ditandai beralihnya mereka pada partai PPP. Faktor ketidakpuasan, kekecewaan, dan krisis ketidakpercayaan pada akhirnya menyebabkan hengkangnya beberapa petinggi pesantren ini dari partai PPP. Beraliansinya mereka dalam suatu partai merupakan wujud nyata hasil dari sebuah proses pendidikan atau sosialisasi politik. Secara langsung atau tidak langsung preferensi politik kiai sebagai pemimpin pondok pesantren dapat berpengaruh juga dalam internalisasi atau peawarisan nilai-nilai politik pada para santrinya. Ada sebuah paradigma yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa preferensi politik para santri dalam suatu pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh kiainya. Hal tersebut tentu saja perlu dikaji ulang kebenarannya. Apakah di pesantren Turus juga berlaku tradisi seperti itu sebagai wujud dari pewarisan nilai-nilai politik ataukah adanya penerapan pendidikan politik yang terbuka (demokrasi).

Pondok pesantren Turus yang terletak di Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang yang memiliki misi, "Berperan serta secara aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal yang dilandasi nilai-nilai keislaman" ini tentu saja telah jelas memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan politik. Dari uraian di atas

penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah metode yang digunakan dalam proses pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus? Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan studi untuk menyusun skripsi dengan rumusan judul sebagai berikut: **PENDIDIKAN POLITIK DI PESANTREN TURUS (Studi Kasus Pewarisan Nilai-nilai Politik di Pondok Pesantren Turus Kecamatan Pandeglang-Kabupaten Pandeglang).**

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka yang menjadi fokus masalah atau masalah pokok adalah bagaimana pewarisan nilai-nilai politik (pendidikan politik) di pondok pesantren. Untuk memahami masalah penelitian ini secara tepat dan terarah, maka selanjutnya penulis membuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus?
2. Media apa yang digunakan dalam pewarisan/penyampaian nilai-nilai politik pada para santri?
3. Bagaimana bentuk pendidikan politik di pesantren Turus?
4. Apa sajakah yang menjadi tujuan dari pendidikan politik di pesantren Turus?
5. Bagaimana implementasi dari pendidikan politik yang didapat oleh para santri?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu mengetahui secara aktual dan faktual mengenai Pendidikan Politik di Pesantren Turus dalam pewarisan nilai-nilai politik.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pendidikan politik di Pesantren Turus.
2. Mengetahui media yang digunakan dalam pendidikan politik atau pewarisan nilai-nilai politik pada para santri.
3. Mengetahui bagaimana bentuk pendidikan politik yang diterapkan di pesantren Turus.
4. Mengetahui apa sajakah yang menjadi tujuan pendidikan politik di pesantren Turus.
5. Mengetahui sejauhmana implementasi dari pendidikan politik yang dilakukan oleh para santri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi:

1. Aspek Teoritis

Dapat dijadikan informasi untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama adalah untuk pendidikan politik yang berkenaan dengan aspek-aspek kesadaran partisipasi politik masyarakat.

2. Aspek Praktis

- a. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak pesantren terutama Kiai dan para santri, sehingga dapat dijadikan dasar dalam kesadaran berpartisipasi politik.
- b. Memberikan gambaran tentang pendidikan politik di Pesantren.
- c. Memberikan gambaran tentang peranan Kiai di Pesantren dalam pewarisan nilai-nilai politik.
- d. Menambah khasanah pengetahuan bagi penulis.
- e. Sebagai bahan literatur bagi pihak lain yang berminat meneliti lebih lanjut.

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus?
 - a. Bagaimanakah makna pendidikan politik dalam pandangan pesantren Turus?
 - b. Bagaimanakah metode yang digunakan dalam pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus?
 - c. Bagaimanakah proses pewarisan nilai-nilai politik pada para santri?
 - d. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya proses pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus?
 - e. Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Adakah peranan partai politik dalam mensosialisasikan politik di pesantren Turus? Seperti apa dan bagaimana?
2. Media apa yang digunakan dalam pewarisan/penyampaian nilai-nilai politik pada para santri?
 - a. Bagaimanakah bentuk media yang digunakan dalam pewarisan nilai-nilai politik di pesantren Turus?
 - b. Mengapa media dibutuhkan dalam proses pewarisan nilai-nilai politik?
3. Bagaimana bentuk pendidikan politik di pesantren Turus?
 - a. Indoktrinasi selalu identik dengan proses pendidikan/sosialisasi politik. Bagaimanakah indoktrinasi mewarnai proses pewarisan nilai politik di pesantren Turus?
 - b. Terdapat dua bentuk kurikulum dalam pendidikan politik, yaitu *intended curriculum* dan *hidden curriculum*. Termasuk ke dalam kurikulum manakah pendidikan politik di pesantren Turus?
 - c. Mengapa bentuk pendidikan politik tersebut termasuk ke dalam kurikulum itu?

4. Apa sajakah yang menjadi tujuan dari pendidikan politik di pesantren Turus?
 - a. Tiga tujuan utama pendidikan politik yaitu, kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Bagi pesantren Turus sendiri apa sajakah yang menjadi tujuan dari pewarisan nilai-nilai politik?
 - b. Mengapa hal tersebut yang menjadi tujuan dari pewarisan nilai-nilai politik?
 - c. Apa sajakah manfaat dari adanya pewarisan nilai-nilai politik di pesantren?
5. Bagaimana implementasi dari pendidikan politik yang didapat oleh para santri?
 - a. Bagaimanakah eksistensi para santri dalam kehidupan politik baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren (di tengah masyarakat)?
 - b. Bagaimanakah partisipasi para santri pada Pemilu 2009 yang akan datang terutama bagi para pemilih pemula?
 - c. Pondok pesantren seringkali didatangi oleh para calon legislatif untuk berkampanye apalagi Pemilu 2009 sebentar lagi akan diselenggarakan. Bagaimanakah sikap politik para santri menghadapi banyaknya calon legislatif tersebut yang notabene berasal dari berbagai partai politik?
 - d. Adakah doktrin atau pengaruh kiai dalam penentuan preferensi politik para santrinya? Bagaimana dan seperti apa?

F. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pendidikan politik di pesantren ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang

tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Disamping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**, yakni pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap hal, fenomena atau peristiwa yang khas melekat pada objek penelitian berkaitan dengan kajian penelitian ini. “Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer yang berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Data diperoleh berkat adanya peneliti di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung” (Nasution, 1996:59). Menurut M.Q Patton, “Peneliti dalam lapangan lebih mampu memahami konteks data secara holistic dan dapat pula memahami hal-hal baru”.
- b. **Interview** (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 1993:135). Sementara menurut Lincoln dan Guba (1985:266) maksud dari wawancara itu adalah untuk: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang telah dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

- c. **Studi Literatur**, berupa rujukan atau referensi, baik dalam bentuk buku bacaan, berbagai dokumen yang mempunyai keterkaitan erat dengan kajian penelitian ini, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal-jurnal penelitian, serta dokumentasi dari instansi yang terkait yang mendukung.
- d. **Studi Dokumen**, yaitu penggunaan dokumen penting berada di lapangan. Lexy J Moleong (1993:61). Guba dan Lincoln (1981:232-235) mengatakan bahwa dokumen sangat berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang sangat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Turus Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang.

2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kiai Pondok Pesantren Turus, Wakil Pimpinan Pesantren/Ustadz/Staf Pengajar, santri mukim, dan jemaah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J Moleong bahwa:

Menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif tidak ada sample acak, tetapi sample bertujuan (Purposive sample).